

Kepentingan Jepang Dalam Proyek Kereta Cepat Mumbai-Ahmedabad di India

Ni Nyoman Indira Tri Kusuma Riandra¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, A.A. Bagus Surya³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: indirariandra95@gmail.com¹⁾, sukmasushanti@unud.ac.id²⁾, aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This study describes Japan's interest in the construction of the Mumbai-Ahmedabad high-speed train in India using qualitative research methods. This study uses two concepts, at first, the of Japanese national interest which explains that in making a country's policy based on the interests of a country and the concept of stagflation which sees the success of the policies made by the Japanese Prime Minister in achieving their national interest. The results of this research show that the benefits for Japan on the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project are to overcome Japanese stagflation and threats from China.

Key Words: *Quality Infrastructure, Official Development Assistance, Belt and Road Initiative, Bullet Train.*

1. PENDAHULUAN

Sebagian negara di dunia menyadari pentingnya infrastruktur bagi negaranya. Infrastruktur merupakan fasilitas yang selalu dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar makhluk hidup. Tidak dipungkiri bahwa infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap negara khususnya dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bagi negara maju, infrastruktur dianggap sebagai hal yang harus dimiliki. Seperti contohnya, Jepang.

Jepang merupakan negara maju yang terkenal dengan infrastruktur yang canggih dan dilengkapi dengan teknologi yaitu dalam bidang kereta cepat yang kita kenal dengan nama *shinkansen*. *Shinkansen* merupakan kereta api yang memiliki kecepatan tertinggi pertama di dunia dan mulai diresmikan pada tahun 1964 (Taniguchi,1992). *Shinkansen* merupakan

aset besar bagi Jepang dalam meningkatkan perekonomian negaranya.

Pada tahun 1990-an, perekonomian Jepang mengalami pasang surut (Shimpo,2015). Perekonomian Jepang terus merosot sampai dengan runtuhnya Lehman Brother dan gempa bumi Jepang. Melihat keadaan Jepang pada saat itu, Perdana Menteri Jepang mulai memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh negaranya yaitu dalam bidang teknologi. Shinzo Abe memanfaatkan *shinkansen* dan mulai mengekspor infrastruktur berkualitas dalam bidang kereta cepat. Jepang menjadikan Asia sebagai pasarnya dalam mengekspor infrastruktur berkualitas.

Beberapa negara di Asia memiliki kondisi infrastruktur kereta api yang tidak memadai, contohnya, India. seperti yang kita ketahui, di India kerera api merupakan

sarana transportasi utama akan tetapi, India mengalami kendala dalam kapasitas yang mana permintaan masyarakatnya dalam penggunaan kereta api terus meningkat. Sejalan dengan kebijakan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Jepang terkait infrastruktur berkualitas, tentunya menarik perhatian Jepang untuk memberikan bantuan pada India dalam memajukan transportasi kereta apinya. Meskipun pada saat yang bersamaan juga perekonomian Jepang sedang tidak stabil. Penelitian ini kemudian mempertanyakan apa kepentingan Jepang membantu India dalam proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 literatur sebagai acuan dalam menulis. Literature pertama yang digunakan adalah tulisan dari Teresa Mili (2018) yang berjudul *Japan's Role in Strengthening India-Vietnam Relations*. Dalam tulisan ini krisis ekonomi yang dialami Vietnam pada tahun 1973. Saat Vietnam mengalami keterpurukan, Jepang memberikan bantuan kepada Vietnam secara finansial untuk memulihkan kembalinya negara tersebut. Akan tetapi, dalam memberikan bantuan kepada Vietnam, Jepang tidak melakukannya dengan gratis. Melihat kondisi perekonomian Jepang pada saat itu juga mengalami kondisi yang tidak stabil. Tentunya Jepang memiliki maksud lain dibalik bantuannya tersebut.

Jepang melihat posisi Vietnam yang berada pada Laut Cina Selatan. Hal

tersebut dianggap sebagai pintu gerbang negara-negara di ASEAN. Dalam mendapatkan kepentingan nasionalnya, Jepang ingin menjadikan Vietnam sebagai pintu masuk untuk melebarkan sayapnya dikawasan ASEAN. Sehingga Jepang dapat dengan mudah melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya dikawasan Asia.

Literatur dari Mili (2018) memberikan gambaran mengenai peran penting kerjasama antar negara dalam memenuhi tujuan negara. Tulisan ini membantu peneliti dalam menjelaskan bahwa dalam keadaan terpuruk sekalipun suatu negara akan tetap berusaha untuk melakukan hal seperti berinvestasi atau memberikan bantuan kepada negara tetangga guna untuk memulihkan kembali keadaan negaranya. Tulisan Mili (2018) ini juga memberikan contoh lain dalam kerjasama suatu negara. Yangmana dalam melakukan kerjasama, kepentingan nasional tidak hanya terdapat satu kepentingan melainkan adanya kepentingan-kepentingan lainnya.

Dalam tulisan Mili (2018) belum dijelaskan lebih lanjut mengenai *grand strategy* yang dituangkan melalui kepentingan nasional Jepang. oleh karenanya peneliti menambahkan tulisan kedua dari Nobukatsu Kanehara (2016) dengan judul *Japan's Grand Strategy-state, National Interest and Values*. Tulisan ini memberikan gambaran mengenai *grand strategy* Jepang melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin Jepang.

Kanehara (2016) mendefinisikan mengenai kepentingan nasional. Yangmana dalam mencapai suatu kepentingan nasional terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, dalam mencapai kepentingan nasional harus selalu mengutamakan kepentingan bersama secara keseluruhan dan tidak semata-mata demi mencapai kepentingan secara pribadi. Kedua, dalam mencapai kepentingan nasional tentunya harus memikirkan kelangsungan hidup dan kebahagiaan masyarakatnya, yang berarti rakyat merupakan elemen terpenting dalam suatu bangsa.

Kanehara (2016) berpendapat bahwa kepentingan nasional menimbulkan dampak dari perubahan situasi internal dan eksternal suatu negara. Kondisi internal negara memberikan pengaruh pada kebijakan keamanan nasional adalah diplomatis, yangmana sebagian besar hasil dari perang ditentukan oleh diplomasi yang dilakukan sebelum pertempuran dimulai. Ahli strategi Tai Gong Wang dalam Kanehara (2016) mengatakan bahwa untuk melindungi negara dari ancaman negara luar sebaiknya negara menjalin hubungan persahabatan atau sekutu dengan negara tetangga yang memiliki power yang kuat.

Dalam tulisan Kanehara (2016) memberikan gambaran mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Hal tersebut mengarahkan peneliti pada terciptanya *grand strategy* Jepang yang bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan nasionalnya.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Stagflasi

Stagflasi merupakan suatu perlambatan pertumbuhan perekonomian suatu negara yang disertai dengan adanya pertumbuhan inflasi (Budhiasa, 2012). Menteri keuangan AS sebelumnya dan sekarang merupakan seorang professor Harvard, Summer (2011) menyatakan bahwa ironi sentral dan krisis keuangan merupakan krisis yang disebabkan oleh adanya pengeluaran yang membludak dibandingkan dengan pemasukannya. Sehingga, menyebabkan banyaknya adanya pinjaman. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan terjadinya stagnasi, akan tetapi sudah memasuki stagflasi.

2.2.2 Kepentingan Nasional

Dalam tulisan ini penulis menggunakan definisi dari Nuechterlein (1976) yaitu kepentingan nasional secara sederhana didefinisikan sebagai kebutuhan dan keinginan negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara-negara berdaulat lainnya yang membentuk lingkaran eksternal. Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi empat klasifikasi yang menjadi dasar dari kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu:

1. *Defense Interest* atau kepentingan pertahanan.
2. *Economic Interest* atau kepentingan ekonomi.
3. *World Order Interest* atau kepentingan tatanan dunia.
4. *Ideological interest* atau kepentingan ideologis.

Definisi kepentingan nasional menurut Nuechterlein menggambarkan kepentingan

ekonomi yang sedang dijalankan oleh Jepang dalam pembangunan kereta cepat di India. dalam perkembangan pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan Jepang melalui ODA. Untuk dapat mengatasi stagflasi, Jepang menawarkan ekspor infrastruktur kereta cepat ke India yang dituangkan dalam Abenomics sebagai bentuk dari *grand strategy* Jepang untuk dapat menghentikan stagflasi dinegaranya.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yangmana metode penelitian kualitatif deskriptif ialah suatu penelitian yang bersifat induktif. Hasil penelitian yang didapat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini melalui analisis data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Media Jepang Dalam Kerjasama dengan India

Seperti yang kita ketahui, ODA merupakan organisasi yang digunakan dengan Jepang didalam melakukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi maupun pembangunan. ODA memiliki dua klasifikasi, bantuan bilateral dan bantuan multilateral. Bantuan multilateral ini terdiri dari pembiayaan dan kontribusi keuangan kepada organisasi internasional sedangkan, bantuan bilateral diberikan dalam 3 bentuk, yaitu kerjasama teknik, bantuan pinjaman dan hibah (MOFA Japan,2011).

Dalam kerjasama Jepang dengan India ini, Jepang menggunakan ODA sebagai media penyaluran bantuannya.

ODA memberikan bantuan bilateral kepada India. yangmana Jepang nantinya akan mendukung India dari segi pelatihan, pengiriman tenaga kerja serta menyediakan peralatan. Tidak hanya itu, Jepang juga memberikan bantuan berupa pinjaman yen kepada India melalui ODA. Pinjaman ODA ini menyediakan dana dalam jumlah yang besar bila dibandingkan dengan kerjasama teknis atau bantuan hibah. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa ODA merupakan organisasi yang baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur berskala besar dinegara berkembang.

Mengingat hubungan yang terjalin antara Jepang dan India sangat baik dan juga India merupakan penerima terbesar ODA Jepang dalam beberapa dekade, Melalui ODA Jepang memberikan pinjaman sebesar 12 miliar dolar untuk proyek pembangunan kereta cepat Mumbai-Ahmedabad. Jepang bermurah hati memberikan bunga rendah yaitu 0,1% dengan periode pembayaran 50 tahun dan masa tenggang 15 tahun (JICA,2018). Pembangunan kereta cepat ini menjadi peluang yang cukup baik membantu suatu negara dalam mencapai kepentingan negaranya. Penjelasan mengenai tujuan pemerintah Jepang dalam melakukan kerjasama infrastruktur bersama India dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2 Kepentingan Ekonomi Jepang

Dalam menjadikan negaranya sebagai negara yang memiliki transportasi yang baik serta untuk menyenangkan rakyatnya, India memutuskan untuk memperknalkan sistem *shinkansen* kepada masyarakatnya. Dan mengumumkan bahwa India akan

bekerjasama dengan Jepang dalam melaksanakan proyek tersebut di Mumbai-Ahmedabad yang akan dimulai pada tahun 2017. Sejalan dengan kebijakan Jepang yaitu infrastruktur berkualitas ini yang akan memfokuskan pasarnya pada Asia. Yangmana Perdana Menteri Jepang menganggap bahwa Asia merupakan salah satu pasar terbesar untuk pembangunan infrastruktur dalam beberapa dekade mendatang.

Sejak dimulainya hubungan kerjasama India dan Jepang, menjadikan perekonomian Jepang dan India terus berkembang.

Tabel 1. Peningkatan Perekonomian Jepang dan India Tahun 2008-2019.

Japan-India Trade (Yen billion)												
Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trade from India to Japan	544	343	400	545	530	600	739	500	530	610	555	500
Trade from Japan to India	610	501	702	682	645	630	661	561	600	1,044	1,200	1,107

(source: Japanese government documents)

Direct Investment from Japan (Yen billion)												
Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Direct Investment from Japan	540	344	341	181	223	210	202	300	304	357	307	324

Sumber: Mofa Japan, 2021

Dapat kita lihat tabel diatas menunjukkan peningkatan yang dialami kedua negara dalam perdagangan. Investasi langsung dari Jepang ke India telah meningkat dan Jepang merupakan investor terbesar bagi India. Selain itu, minat sektor swasta Jepang meningkat dan banyak perusahaan-perusahaan Jepang memiliki cabang di India. Kerjasama ini mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada Jepang. Perekonomian Jepang mulai stabil dan proses ekspor-impor, perdagangan serta investasi di

Jepang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tidak dipungkiri, dalam kerjasama pembangunan kereta cepat ini dilakukan guna untuk mencapai keuntungan ekonomi dari Jepang. Akan tetapi, dalam kerjasama ini tentunya memberikan keuntungan juga bagi India, yangmana dalam proyek ini India dapat mewujudkan “*make in India*” yang merupakan istilah dari pemerintah India yang berarti pemerintah India ingin mendorong perusahaan multinasional serta domestik dalam memproduksi produk mereka di India (Bishnoi,2017). Selain itu, *make in India* ini bertujuan mengubah India menjadi pusat desain, manufaktur dan ekspor global dan tentunya proyek ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi para investor untuk masuk ke India.

Dalam tulisan ini Jepang mengambil nilai-nilai dari *economic state* dan *attitude of allies and friends* dalam mencapai kepentingan nasionalnya di India. terlepas dari kebutuhannya untuk merevitalisasi ekonominya sendiri tujuan Jepang lainnya dalam persaingan HSR dengan China adalah untuk berkontribusi dari strategi penyeimbangan Asia-Pasifik dan menahan China. Kemudian, pertimbangan adanya dominasi dari kekuatan China dalam membawa perubahan di berbagai negara di Asia. Jepang merupakan pengembang infrastruktur regional yang telah lama berdiri di Asia dan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal teknologi, keselamatan penumpang dan tanggung jawab sosial bagi masyarakatnya.

Dibandingkan dengan China yang dapat dikatakan baru terjun dalam hal pembangunan infrastruktur kereta cepat, akan tetapi teknologi HSR China telah berkembang dengan pesat dibandingkan Jepang. melihat hal tersebut Jepang ingin menunjukkan bahwa negaranya lebih baik dari China dalam hal pembangunan HSR tersebut.

4.3 Kepentingan *World Order* Jepang

Kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang ini memang ada hubungannya dengan kebijakan China yang bertujuan dengan pengembangan terbesar dalam sejarah modern. Pada akhir tahun 2013, Presiden China Xi Jinping mengumumkan pembangunan jalur ekonomi, jalur sutra yang dikenal dengan nama *One Belt, One Road (OBOR)*. Strategi pembangunan *Belt and Road Initiative (BRI)* yang dibangun oleh China ini bertujuan untuk membangun konektivitas dan kerjasama di 6 koridor utama ekonomi, yaitu Mongolia dan Rusia, New Eurasia Land Bridge, Asia Tengah dan Asia Barat, Semenanjung Indocina, Pakistan, Bangladesh, Myanmar dan India (Rand Europe, 2018).

Sejalan dengan perspektif dari BRI China, Jepang menciptakan *Partnership for Quality* tidak lain merupakan reaksi Jepang terhadap BRI China. Dalam kebijakan ini Jepang lebih menekankan niatnya pada rencana pembangunan infrastruktur disetiap negara dan bekerjasama dengan India. Akan tetapi, dalam hal ini China

memberikan penawaran pembangunan infrastruktur dengan harga yang sangat murah. Melihat hal tersebut Jepang tidak dapat membuat proposal tandingan yang dapat mengalahkan harga dari yang ditawarkan China, akan tetapi Jepang membuat keputusan dengan lebih mengutamakan kualitasnya. Jepang menawarkan kualitas yang tinggi seperti *shinkansen* dengan harga yang sesuai.

Infrastruktur yang didanai oleh Jepang di timur laut India merupakan kepentingan Jepang sekaligus kepentingan ekonomi Jepang. hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Nuechterlein (1976) menyatakan bahwa pemerintah memiliki nilai-nilai tersendiri dalam memutuskan kepentingan negaranya dalam suatu peristiwa maupun permasalahan internasional. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Jepang dalam hal ini memiliki nilai-nilai tersendiri dalam memutuskan kepentingan negaranya seperti :

- *Nature of the Threat*, atau sifat ancaman. Faktor ini mempengaruhi kepentingan pertahanan, yangmana negara akan mempertimbangkan tingkat konflik dan bahaya yang ditimbulkan terhadap kepentingan negaranya. Yangmana dalam tulisan ini Jepang membentuk kebijakan *Partnership for Quality Infrastructure* yang merupakan bentuk dari reaksi Jepang terhadap BRI dari China.

- *Effect on Balance of Power*, atau keseimbangan kekuasaan. Faktor ini dapat mempengaruhi kepentingan tatanan dunia dan pertahanan, yang mana keseimbangan kekuasaan antar negara atau aliansi harus dijaga agar tidak ada negara dengan kekuasaan yang paling mendominasi. Dengan dibentuknya kebijakan Jepang yaitu infrastruktur berkualitas, Jepang berharap nantinya mampu menjaga kekuasaan atau posisinya di Asia sebagai negara yang memiliki power.

Dalam tulisan ini Jepang mengambil nilai-nilai dari *Nature of the Threat* dan *Effect on Balance of Power* dalam mencapai kepentingan nasionalnya di India. Kebijakan infrastruktur berkualitas yang diluncurkan Jepang merupakan bukti Jepang untuk mengatasi stagflasi yang terjadi di Jepang selama bertahun-tahun sekaligus menghadapi sifat ancaman dari China dan menjaga keseimbangan kekuasaannya di negara Asia.

5. KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam sebuah kerjasama antar negara tetap mengutamakan perolehan keuntungan relatif. Perekonomian Jepang mengalami stagflasi selama bertahun-tahun, untuk menyiasati hal tersebut Perdana Menteri

Jepang membuat strategi dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki negaranya yaitu dalam bidang teknologi.

Tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi negaranya akan tetapi Jepang juga dapat mengimbangi kekuatan China di Asia dengan bekerjasama dengan India. pembangunan ini juga merupakan kepentingan bisnis Jepang dalam menjadikan India sebagai batu loncatan ke negara-negara yang ada di dunia. Dapat dikatakan simpulan dari penelitian ini adalah kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Shinzo Abe ini guna dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di Jepang serta mempertimbangkan pendekatan sederhana Jepang dimasa lalu terhadap India dan keenggannya untuk melibatkan India secara komprehensif, terungkapnya era baru dalam kebijakan Jepang terhadap India dapat dipahami dalam hal tanggapan strategis terhadap kebangkitan China.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Nuechterlein, D.E. 1977. *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual for Analysis and Decision Making*. Foreign Service Journal, July 1977. Vol.54, no.7.
- Bishnoi, Vishal. (2017). *Make in India Initiative: A Key for Sustainable Growth*. <file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/VidyaJournalMakeinIndia.pdf>. Diakses pada 21 Desember 2020.
- Kanehara, Nobukatsu. 2016. *Japan's Grand Strategy-State, National Interests and Values*. https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160325

- [Nobukatsu Kanehara.pdf](#).
Diakses pada 12 Januari 2020.
- Mili, Teresa. 2018. *Japan's Role in Strengthening India-Vietnam Relations*.
https://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_20542383.pdf. Diakses pada 30 Oktober 2020.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2011). *Overview of Japan's ODA to India*.
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/sw_asia/india_o.pdf. Diakses pada 5 Desember 2020.
- Rand Europe. (2018). *China Belt and Road Initiative: How Revival of the Silk Road Could Impact World Trade*.
<file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/RB-10029-CAPP.pdf>.
Diakses pada 6 Desember 2020.
- Shimpo, Seiji. 2015. *Stagflation in Japan*.
<http://dx.doi.org/10.2753/JES1097-203X10023>. Diakses pada 2 Maret 2020.
- Tanughici, Mamoro. (1992). *High Speed Rail in Japan: A Review and Evaluation of the Shinkansen Rail*.
<https://escholarship.org/content/qt5s48m11f/qt5s48m11f.pdf>. Diakses pada 28 November 2020.
- JICA.(2018). *JICA Supports Project for The Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail by Providing an ODA Loan of INR 5,500 Crore as Tranche 1*.
https://www.jica.go.jp/india/english/office/topics/press180928_01.html.
Diakses pada 15 Januari 2020.